

# PEMANFAATAN TERBITAN PEMERINTAH DI KANTOR DPRD SUMATERA BARAT

Rahmah Hayati<sup>1</sup>, Marlini<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan  
FBS Universitas Negeri Padang  
email: pisces\_2491@rocketmail.com

## **Abstract**

*This paper discuss about the beneficial of government publication at DPRD West Sumatera. This study were purpose to describe: (1) the beneficial of government publication within the office of DPRD West Sumatera; (2) the constraints which faced in process of beneficial of government publication at the office of DPRD West Sumatera. The data were collected by direct monitoring and interview with Kabag and Kasubag of the office of DPRD West Sumatera. The analyzing of data by descriptive way. Based on the analyzing of data, that can concluded the things such as. First, the beneficial of government publication at the office of DPRD West Sumatera was unfulfill resembled. Second, the constrain which faced in process of beneficial of government publication at the office of DPRD West Sumatera; (1) the collection of government publication is not on good arrangement yet; (2) the source of human power (SDM) which is less; (3) the responsibility of librarian, and (4) there is no input of data of government publication to computer.*

**Keywords:** government publication

## **A. Pendahuluan**

Terbitan pemerintah biasanya menjadi suatu acuan dalam pengembangan sistem pemerintah. Terbitan pemerintah pada hakikatnya berisi mengenai masalah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Menurut Saleh (2009: 87) terbitan pemerintah adalah publikasi atau bahan pustaka yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah, melalui lembaga resmi yang berisi informasi mengenai pemerintahan, peraturan-peraturan atau perundangan, dan pengumuman-pengumuman resmi. Sedangkan menurut Lasa (1994: 70) terbitan pemerintah merupakan informasi resmi dalam bidang-bidang: pertanian, statistik, peraturan perundangan, pendidikan, dan pertahanan.

Menurut Mustafa (2008: 27) terbitan pemerintah adalah setiap penerbitan yang dicetak atas biaya pemerintah, atau diterbitkan oleh badan-badan

---

<sup>1</sup>Mahasiswa penulis makalah Prodi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, wisuda periode September 2012

<sup>2</sup>Pembimbing, Dosen FBS Universitas Negeri Padang

pemerintah, yang pada umumnya berisi hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah pemerintahan atau masalah-masalah untuk kepentingan umum. Lebih lanjut Yusuf (2009: 436) menerangkan bahwa dokumen pemerintah atau sering disebut dengan terbitan pemerintah adalah karya yang dicetak dan diterbitkan atas biaya dan kewenangan pemerintah atau badan-badan pemerintah.

Ditegaskan oleh Suwarno (2011: 66) terbitan pemerintah merupakan jenis buku yang termasuk sebagai bahan rujukan yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah melalui lembaga resmi yang berisi informasi yang berkaitan dengan masalah pemerintahan atau masalah-masalah untuk kepentingan umum. *American Library Assosiation Glosary of library and Information Science* membatasi terbitan pemerintah dan badan Internasional sebagai berikut: setiap terbitan yang berasal dari, diterbitkan oleh, atau dengan biaya dan wewenang setiap kantor resmi atau lembaga Internasional.

DPRD Sumatera Barat merupakan lembaga yang melakukan proses kegiatan pemerintahan dan menghasilkan berbagai bentuk informasi resmi dari hasil rapat maupun sidang yang dilakukan oleh anggota dewan bersama kepala daerah. Terbitan pemerintah ini berupa peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam sidang paripurna anggota dewan dan pemerintah daerah. Terbitan pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua pegawai dalam melakukan proses kegiatan pemerintahan dan mengambil suatu keputusan yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan yang telah ditetapkan.

Terbitan pemerintah tergolong pada koleksi referensi yang diterbitkan lembaga pemerintah. Sumardji dalam Rahayuningsih (2007: 105) menerangkan bahwa koleksi referensi adalah kumpulan atau kelompok koleksi pustaka yang terdiri dari bahan pustaka berisi karya-karya yang bersifat memberitahu atau menunjukkan mengenai informasi-informasi tertentu yang disusun secara sistematis (biasanya disusun berdasarkan alfabet) untuk digunakan sebagai alat petunjuk atau konsultasi. Setiap koleksi referensi dapat dibedakan menurut sifat maupun isi informasinya. Menurut Yusuf (2009: 407-439) koleksi referensi terdiri atas beberapa bagian yaitu: (1) kamus; (2) ensiklopedia; (3) buku tahunan; (4) buku pedoman; (5) direktori; (6) almanak; (7) bibliografi; (8) katalog; (9) indeks; (10) abstrak; (11) atlas; (12) terbitan pemerintah; (13) laporan hasil penelitian; (14) sumber informasi geografi, biografi dan petunjuk perjalanan.

Lebih lanjut Sulistyono-Basuki (1991: 437-438) menjelaskan bahwa buku referensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) buku referensi ditujukan untuk keperluan konsultasi; (2) buku referensi tidak dimaksudkan untuk dibaca seperti buku biasa; (3) buku referensi sering kali terdiri dari entri yang terpotong-potong; (4) di perpustakaan, buku referensi biasanya tidak dipinjamkan karena buku tersebut diperlukan setiap waktu untuk konsultasi; (5) informasi disusun untuk memudahkan penelusuran secara cepat dan menyeluruh. Susunan ini dapat menurut abjad, judul, subjek, atau kronologis disertai indeks untuk keperluan temu balik.

Koleksi terbitan pemerintah yang terdapat di kantor DPRD Sumatera Barat seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan studi dan penelitian serta harus diketahui oleh setiap kelompok masyarakat tertentu yang berupa hasil sidang kabinet, sensus penduduk, pajak, undang-undang lalu lintas, undang-undang perkawinan, undang-undang pendidikan. Namun, kenyataannya tidak ada

masyarakat yang datang ke DPRD Sumatera Barat untuk mencari koleksi terbitan pemerintah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995: 928) pemanfaatan adalah proses, cara atau perbuatan memanfaatkan. Terbitan pemerintah ini sangat penting kedudukannya, karena isi dari hasil terbitan merupakan data mengenai kemajuan dan kondisi kenegaraan serta kemasyarakatan yang sangat kompleks. Sedangkan Yusuf (2009: 438) menerangkan gunanya terbitan pemerintah bagi pembaca yaitu sebagai bahan keterangan dan pengetahuan supaya tidak buta terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Peraturan perundangan yang berlaku di suatu negara, keputusan-keputusan pemerintah dan kebijaksanaan pemerintah lainnya, sangat penting diketahui oleh segenap anggota masyarakat.

Terbitan pemerintah merupakan koleksi dari perpustakaan, jadi fungsi terbitan pemerintah berkaitan dengan fungsi koleksi perpustakaan secara umum. Menurut Sinaga (2011: 39-41) fungsi koleksi perpustakaan yaitu: (1) fungsi referens adalah koleksi perpustakaan yang bisa memberikan rujukan tentang berbagai informasi secara cepat, tepat, dan akurat; (2) fungsi kurikular adalah bahan-bahan yang mampu mendukung kurikulum; (3) fungsi umum adalah setiap orang yang datang ke perpustakaan mempunyai kebutuhan, apakah dia ingin mengetahui tentang informasi tertentu, bagaimana cara mengerjakan sesuatu, mau meminjam sesuatu, dan (4) fungsi penelitian adalah perpustakaan dapat dijadikan sarana yang menyediakan berbagai sumber informasi yang dibutuhkan pemakai atau peneliti dalam melakukan tugasnya.

Penerbitan pemerintah merupakan salah satu penghubung antara pemerintah dengan masyarakat umum mengenai suatu kebijakan. Menurut Adinfash (2011) sebagai salah satu sarana penerangan dan penyuluhan yang dikelola pemerintah. Penerbitan pemerintah bertujuan untuk membina sikap mental dan sikap hidup manusia yang berasaskan Pancasila, baik sebagai perorangan maupun sebagai bangsa dan bergairah untuk membangun. Dengan tujuan tersebut, penerbitan pemerintah harus berfungsi sebagai sarana untuk merangsang motivasi, keikutsertaan dan keterlibatan diri dalam kegiatan pembangunan demi tercapainya cita-cita masyarakat dan bangsa. Selanjutnya penerbitan pemerintah berfungsi pula mengamankan kebijakan pemerintah di forum nasional dan internasional serta membina dan memupuk saling pengertian dan persahabatan antar bangsa.

Ada kalanya suatu informasi justru hanya diperoleh pada terbitan pemerintah, karena informasinya tidak terdapat di dalam buku lain yang dapat diperoleh secara bebas atau dijual di toko buku. Oleh sebab itu terbitan pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang memerlukan demi tercapainya tujuan dan manfaat dari penerbitan berbagai jenis terbitan pemerintah tersebut.

Tidak adanya masyarakat yang datang ke kantor DPRD Sumatera Barat untuk mencari koleksi terbitan pemerintah, suatu hal yang perlu dikaji dan diteliti. Mengapa masyarakat tidak ada datang ke DPRD Sumatera Barat untuk mencari koleksi terbitan pemerintah? Sementara hendaknya masyarakat dapat memanfaatkan koleksi terbitan pemerintah yang ada di DPRD dalam studi maupun penelitian. Hal ini menjadi penting diteliti dan ditemukan alasannya.

Menurut Mustafa (2008: 29) contoh terbitan pemerintah adalah: (1) *Izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai bagi pegawai negeri sipil*. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983. Tgl. 26 April 1983. Departemen penerangan 1983; (2) *Undang-undang perpajakan beserta pajak bumi dan bangunan*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986. Berisi undang-undang no. 6, 7, 8 tahun 1983 serta Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 1983; (3) *Pidato presiden pengantar nota keuangan APBN tahun 1993*.

Yusuf (2009: 437) juga mengemukakan beberapa contoh penerbitan pemerintah adalah sebagai berikut. (1) Sekretariat Negara. *Pidato Kenegaraan RI*. Tanggal 16 Agustus 1985. Jakarta. 1985; (2) Universitas Padjajaran. *Laporan Rektor pada Dies Natalis XXIX Universitas Padjajaran*. Universitas Padjajaran. Bandung. 1986; (3) U.S. Superintendent of Documents. *Monthly Catalog of United States Government Publication*. Washington. D.C. 1895 sampai sekarang. Bulanan, dan (4) Biro Pusat Statistik. *Statistik Indonesia Tahun 1985*.

Menurut Lasa (1994: 70) secara garis besar terbitan pemerintah mencakup: (1) kegiatan pemerintah yang perlu diketahui oleh masyarakat awam seperti: pemilihan umum, sensus penduduk, dan sidang kabinet; (2) informasi resmi yang dapat dipergunakan sebagai bahan studi maupun penelitian; (3) perundang-undangan, peraturan, ketetapan pemerintah yang harus diketahui oleh setiap warga negara maupun kelompok masyarakat tertentu seperti: pajak, undang-undang lalu lintas, undang-undang perkawinan, dan undang-undang pendidikan. Sedangkan menurut Yusuf (2009: 437) informasi penting yang dapat diperoleh melalui penerbitan atau dokumen pemerintah ini, antara lain tentang peraturan-peraturan pemerintah, undang-undang dan surat keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan masalah lain yang dikeluarkan atas kewenangan dan tanggung jawab pemerintah.

Menurut Mustafa (2008: 30) ciri umum terbitan pemerintah adalah sebagai berikut. (1) Diterbitkan dalam jumlah yang sangat banyak dan dibagikan secara cuma-cuma kepada banyak pihak, nasional atau internasional sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi; (2) selain diterbitkan oleh pemerintah atau kantor pusat, pemerintah daerah atau kantor cabang. Meskipun biasanya di pemerintahan kantor pusat ada bagian penerbitan khusus; (3) kebanyakan terbitan ini tidak dikenal secara umum dan hanya ditemukan di kantor-kantor resmi atau di perpustakaan besar; (4) terbitan jenis ini jarang dicakup dalam bibliografi; (5) katalog resmi terbitan pemerintah sering kurang informatif; (6) terbitan ini jarang ditemukan di toko-toko buku pada umumnya; (7) memungkinkan jenis rujukan satu-satunya mengenai informasi yang dibutuhkan

Lebih lanjut Yusuf (2010: 17) menerangkan, terbitan pemerintah dapat dilihat dari dua segi yaitu: dari lembaga yang menerbitkannya, dan dari segi penggunaannya. Dilihat dari lembaga yang menerbitkannya antara lain adalah lembaga-lembaga resmi yang bernaung di bawah pemerintah, baik pusat maupun daerah, seperti sekretariat negara, departemen pemerintahan, dan termasuk lembaga lain yang bersifat komersial di bawah naungan pemerintah. Sedangkan dari segi penggunaannya publikasi dan dokumen pemerintah bisa dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut. (1) rekaman administrasi negara atau pemerintah; (2) dokumen penelitian para ahli termasuk sejumlah data dan

statistik yang amat besar nilainya, sampai kepada masalah sains dan bisnis; (3) sumber-sumber informasi yang sifatnya umum.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemanfaatan terbitan pemerintah yang ada di kantor DPRD Sumatera Barat dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemanfaatan terbitan pemerintah di kantor DPRD Sumatera Barat.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan pada fakta yang ada atau fenomena yang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya sehingga dihasilkan perian bahasa seperti apa adanya karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dari informan (Sudaryanto, 1992:62).

Penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan pemanfaatan terbitan pemerintah di kantor DPRD Sumatera Barat. Data diperoleh melalui pengamatan secara langsung dan wawancara dengan pegawai kantor DPRD Sumatera Barat.

## **C. Pembahasan**

### **Pemanfaatan Terbitan Pemerintah di Kantor DPRD Sumatera Barat**

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di DPRD Sumatera Barat, koleksi perpustakaan yang dimiliki saat ini sekitar 5.500 buku terutamanya koleksi terbitan pemerintah berupa peraturan daerah, lembaran daerah, peraturan pemerintah, dan ensiklopedia. Perpustakaan ini jarang dikunjungi pegawai kantor DPRD maupun anggota dewan. Hal ini disebabkan, karena perpustakaan di DPRD Sumatera Barat masih dalam penataan kembali koleksi-koleksinya, sehingga pegawai maupun anggota dewan yang ingin berkunjung tidak bisa memanfaatkan koleksi yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Dokumentasi dan Perpustakaan bahwa pegawai kantor DPRD Sumatera Barat memanfaatkan terbitan pemerintah sesuai kebutuhan dalam menentukan suatu kebijakan dalam kegiatan Dokumentasi dan Perpustakaan. Dalam kegiatan Dokumentasi dan Perpustakaan kantor DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Hukum. Terbitan pemerintah yang ada di perpustakaan DPRD Sumatera Barat yaitu: peraturan daerah, lembaran daerah, undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan presiden. Dalam setahunnya DPRD menghasilkan sekitar 15 terbitan pemerintah.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan Kabag Publikasi dan Informasiterbitan pemerintah dimanfaatkan dalam rapat atau pun sidang paripurna di DPRD yaitu dengan berpedoman kembali pada peraturan daerah yang telah ditetapkan tahun lalu jika mengalami perubahan. Dalam sidang maupun rapat sudah pasti berpedoman pada undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Tahun 2012 ini DPRD akan menetapkan 20 peraturan daerah seperti peraturan daerah tentang kawasan bebas asap rokok dan mengenai panas bumi.

Fungsi koleksi perpustakaan adalah sebagai berikut. (1) fungsi referens adalah koleksi perpustakaan bisa digunakan sebagai rujukan mengenai suatu informasi yang dapat diperoleh secara cepat, dan tepat. Di DPRD Sumatera Barat

fungsi koleksi perpustakaan sebagai referensi sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Pegawai DPRD Sumatera Barat memanfaatkan koleksi perpustakaan untuk referensi dalam mencari informasi yang dibutuhkannya dalam kegiatan kantor; (2) fungsi kurikular adalah koleksi perpustakaan yang dapat mendukung kurikulum pendidikan. Fungsi koleksi perpustakaan sebagai fungsi kurikular tidak ada terlaksana di DPRD Sumatera Barat. Seharusnya fungsi kurikular tersebut dapat terlaksana untuk mendukung kurikulum pendidikan; (3) fungsi umum adalah dimana setiap orang yang datang ke perpustakaan mempunyai kepentingan baik itu untuk mencari informasi tertentu, dan meminjam sesuatu. Fungsi ini sudah dilaksanakan di Perpustakaan DPRD Sumatera Barat, dimana pegawai kantor meminjam koleksi perpustakaan untuk mencari suatu informasi; (4) fungsi penelitian adalah perpustakaan sarana yang menyediakan berbagai sumber informasi yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan tugasnya. Banyak peneliti yang datang ke DPRD Sumatera Barat untuk melakukan penelitian di Perpustakaan DPRD Sumatera Barat.

Agar pemanfaatan terbitan pemerintah dapat berjalan baik hendaknya DPRD Sumatera Barat mensosialisasikan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan anggota dewan dan pemerintah dalam sidang paripurna kepada masyarakat umum. Dengan mensosialisasikan Informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat umum maka secara otomatis akan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan baru pemerintah yang akan berlaku dan yang sedang diberlakukan.

Terbitan pemerintah yang ada di Perpustakaan DPRD Sumatera Barat seharusnya dapat dimanfaatkan bagi seluruh pegawai dan anggota dewan sebagai bahan referensi, penunjang dalam pengambilan keputusan dan penetapan suatu kebijakan. Terbitan pemerintah juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan referensi, pedoman dan bahan penelitian. Jadi, dari kenyataan yang didapat maka Kantor DPRD Sumatera Barat sebaiknya memperhatikan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari koleksi referensi terbitan pemerintah.

### **Kendala-kendala yang dihadapi dalam Proses Pemanfaatan Terbitan Pemerintah**

Adapun kendala yang dihadapi dalam proses pemanfaatan terbitan pemerintah di kantor ini yaitu: (1) koleksi terbitan pemerintah belum tertata dengan rapi. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di Perpustakaan DPRD Sumatera Barat koleksi terbitan pemerintah seperti Himpunan Peraturan Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) belum tertata rapi secara keseluruhan. Semenjak terjadinya gempa September 2009 hingga sekarang penataan koleksi terbitan pemerintah belum optimal. Masih banyak tumpukan Peraturan Daerah yang belum disusun di lemari pajang koleksi. Kendala selanjutnya yaitu (2) sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang. Di kantor ini kendala dalam pemanfaatan terbitan pemerintah adalah kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan ilmu perpustakaan. Sehingga pengelolaan koleksi terbitan pemerintah yang ada di kantor ini berjalan lama.

Selain itu, kendala lain yaitu (3) tanggung jawab petugas perpustakaan. Tenaga perpustakaan yang ditunjuk oleh pihak kantor harus memiliki tanggungjawab serta memiliki kemampuan dalam mengelola perpustakaan.

Tenaga perpustakaan sebanyak 7 orang dan 1 orang pustakawan seharusnya bisa mengelola perpustakaan dengan baik, sehingga koleksi perpustakaan bisa dilayanan dengan cepat. Namun pada kenyataan yang terlihat di Perpustakaan DPRD Sumatera Barat tenaga perpustakaan yang bertugas masih belum mencurahkan kemampuan dan perhatiannya secara penuh terhadap perpustakaan. Petugas perpustakaan di kantor DPRD Sumatera Barat dari pengamatan yang penulis lakukan, pada saat jam kerja tidak ada di dalam ruangan perpustakaan.

Hendaknya sebagai tenaga perpustakaan yang telah diberikan tanggung untuk mengelola perpustakaan harus memiliki inisiatif dan aktif dalam melaksanakan tugasnya, agar koleksi terbitan pemerintah yang dimiliki perpustakaan dapat dimanfaatkan sepenuhnya bagi seluruh pegawai. Kendala lain yang ditemukan yaitu (4) belum adanya *input* data ke komputer semenjak gempa September 2009 mengenai jumlah koleksi terbitan pemerintah yang ada di perpustakaan oleh bagian dokumentasi dan perpustakaan. Hal ini disebabkan karena gedung direnovasi setelah terjadinya gempa. Koleksi perpustakaan disimpan di dalam karung, sehingga tidak diketahui judul terbitan pemerintah yang ada. Oleh sebab itu jika kita ingin mengetahui terbitan pemerintah apa saja yang ada di Perpustakaan DPRD sangat sulit. Hal ini mengakibatkan lambatnya proses temu kembali terbitan pemerintah yang ada di Perpustakaan DPRD Sumatera Barat. Penyimpanan data di komputer sangat diperlukan dalam kegiatan kantor agar memudahkan penelusuran informasi. Dengan adanya *input* data tersebut bisa diketahui berapa banyak koleksi terbitan pemerintah yang dimiliki perpustakaan setiap tahunnya.

#### **D. Simpulan dan Saran**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. (1) pemanfaatan terbitan pemerintah di DPRD Sumatera Barat belum terlaksana secara optimal. Pemanfaatan terbitan pemerintah tersebut dapat dilihat dari segi fungsi koleksi perpustakaan yaitu: fungsi referens, fungsi kurikular, fungsi umum, dan fungsi penelitian. Fungsi referens sudah terlaksana di DPRD Sumatera Barat sebagaimana mestinya yaitu koleksi perpustakaan seperti terbitan pemerintah sudah dimanfaatkan sebagai rujukan bagi pegawai DPRD. Fungsi kurikular belum terlaksana sesuai fungsi dari koleksi perpustakaan tersebut untuk mendukung kurikulum. Sedangkan fungsi umum dari koleksi perpustakaan yang dimanfaatkan pegawai kantor untuk mencari suatu informasi maupun meminjam koleksi terbitan pemerintah. Fungsi penelitian dari koleksi perpustakaan sudah terlaksana yaitu banyak peneliti yang melakukan penelitian di perpustakaan DPRD Sumatera Barat; (2) kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan terbitan pemerintah yaitu: koleksi terbitan pemerintah belum tertata rapi, sumber daya manusia (SDM) yang kurang, tanggung jawab petugas perpustakaan, belum adanya *input* data terbitan pemerintah ke komputer. Penyimpanan data jumlah koleksi terbitan pemerintah ke komputer sangat diperlukan agar mempermudah penelusuran informasi dan tidak harus memeriksa ke rak koleksi apa yang dicari. Dengan adanya *input* data ke komputer akan mempercepat proses temu kembali informasi.

Temuan ini sangat penting dipahami dan dipedomani oleh pegawai kantor DPRD dan masyarakat luas yang akan memanfaatkan terbitan pemerintah itu sendiri. Proses pemanfaatan terbitan pemerintah tersebut akan berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Hal ini didasarkan pada kajian pemanfaatan terbitan pemerintah dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan terbitan pemerintah di kantor DPRD Sumatera Barat.

**Catatan:** artikel ini disusun berdasarkan makalah tugas akhir penulis dengan pembimbing Marlini, S.IPI, MLIS.

### Daftar Rujukan

- Adinfafash. 2011. " Peran Terbitan Pemerintah" dalam <http://adinfafash.wordpress.com/2011/11/29/peran-terbitan-pemerintah/>. Diakses 08 Mei 2012.
- Lasa. 1994. *Jenis-jenis Pelayanan Informasi Perpustakaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mustafa, Badollahi. 2008. *Materi Pokok Bahan Rujukan Umum*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Rahayuningsih, F. 2007. *Pengelolaan Perpustakaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saleh, Abdul Rahman. 2009. *Pengantar Kepustakaan: Pedoman Bagi Pengguna Perpustakaan di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sagung Seto.
- Sinaga, Dian. 2011. *Mengelola Perpustakaan Sekolah*. Bandung: Bejana.
- Sudaryanto. 1992. *Metode Linguistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sulistyo-Basuki. 1991. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suwarno, Wiji. 2011. *Perpustakaan dan Buku: Wacana Penulisan dan Penerbitan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Yusuf, Pawit M. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, Pawit M. 2009. *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan*. Jakarta: Bumi Aksara.